

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu sistem politik yang digunakan untuk mencapai keputusan-keputusan politik yang dilaksanakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat melalui kontestasi politik dalam pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dengan adil dalam upaya memperebutkan suara rakyat. Di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, setiap warga negara yang sudah dewasa (umur 17 tahun) mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Bawamenewi, 2019).

Keikutsertaan masyarakat pada saat proses berlangsungnya pemilihan umum dinilai penting karena pada dasarnya partisipasi politik masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Partisipasi politik yang dimaksud di sini adalah keikutsertaan masyarakat dalam hal ini warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dengan ikut berpartisipasi memilih secara langsung pemimpin yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (Sukma & Rahman, 2018).

Partisipasi politik rakyat dalam pemilu memberikan pemahaman mengenai perilaku politik. Perilaku politik sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Bangsa Indonesia yang sangat besar ini memiliki latar belakang masyarakat yang heterogen dan bervariasi, hal inilah yang membuat kondisi sosial, ekonomi, psikologis dan budaya di lingkungan masyarakat Indonesia berbeda-beda. Terdapat pula kelompok-kelompok kategorial dalam masyarakat, seperti jenis kelamin, perbedaan usia dan perbedaan pendidikan. Hal-hal ini mempengaruhi perilaku politik pada momen politik nantinya.

Sebagai manifestasi sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari budaya politik sebagaimana yang diutarakan oleh Almond dan Verba (Malau, 2012) diartikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dengan memahami budaya politik tentu dapat mengetahui perilaku politik dimana setiap tradisi yang berada di masyarakat sebagai pola tingkah laku yang khas dalam kehidupan berpolitik. Di tingkat daerah demokrasi cukup prospektif dan dinamis. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pola perilaku dan kebiasaan yang muncul di dalam proses pemilihan tersebut akan membentuk budaya politik di dalam suatu masyarakat, inilah yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan penentuan keputusan memilih.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, memiliki berbagai macam suku dan etnis yang ada di dalamnya. Sumatera Utara juga dikenal dengan nilai kekeluargaan yang dinilai sangat erat. Sehingga tidaklah mengherankan jika pada saat pemilihan umum banyak para calon menggandeng sesuai dengan ciri khasannya, baik dalam hal suku maupun marga. Hal ini sulit untuk dihindari, mengingat salah satu suku terbanyak di Sumatera Utara adalah suku Batak Toba yang dinilai memegang keluhuran dan kekeleuargaan. Dalam konteks adat istiadat, suku Batak Toba yang masih memegang erat dan menjalankan adat istiadat serta kebiasaan dan juga aturan-aturan di dalamnya. Adat istiadat yang begitu kuat dalam adat Batak Toba yaitu tungku nan tiga (*dalihan natolu*), dimana dinilai menjadi dasar adat yang masih sangat erat dipegang oleh suku Batak Toba.

Daerah asal mula Batak Toba itu sendiri yang sudah terkenal kepenjuru dunia adalah pulau Samosir. Pulau Samosir merupakan tempat pertama kali bangsa batak itu ada hingga pada akhirnya merantau dan menyebar hingga ke segala tempat yang ada di Indonesia ini. Sehingga pulau Samosir di identik dengan tanah bangsa batak yang sekaligus menjadi suku mayoritas disana, hingga pada akhirnya berdiri menjadi sebuah kabupaten yang sekarang dinamai Kabupaten Samosir.

Di Kabupaten Samosir, dengan hadirnya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang salah satunya menetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pemilihan kepala daerah

Kabupaten Samosir umumnya yang menjadi pokok bahasan menarik adalah filosofi *dalihan natolu* (tungku nan tiga) sebagai pranata sosial masyarakat Batak Toba yang merupakan penduduk mayoritas Kabupaten Samosir. Tungku nantiga (*dalihan natolu*) dalam segi kehidupan masyarakat Batak Toba dipercayai memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan yang merupakan suatu prosedur yang harus diikuti setiap masyarakat yang tidak terlepas dari hubungan kemasyarakatan, baik itu dalam acara adat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tungku nan tiga (*dalihan natolu*) merupakan filosofi masyarakat Batak Toba yang memiliki tiga unsur yaitu hormat kepada pihak yang memberi istri (*somba marhula-hula*), hati-hati dalam satu keturunan atau satu rumpun (*manat mardongan tubu*) dan pihak yang mengambil istri (*elek marboru*) (Panjaitan, 2018).

Dari ketiga unsur tungku nan tiga (*dalihan natolu*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam budaya Batak Toba itu sudah diajarkan sejak dini berperilaku baik, saling tolong menolong dan menghargai, menghormati khususnya yang lebih tua dari kita. Sehingga tungku nan tiga (*dalihan natolu*) menjadi ciri khas budaya Batak Toba yang dijadikan sebagai pandangan dan sekaligus tujuan hidup yang dapat dirumuskan sebagai satu rangkaian tiga kata, yaitu Kekayaan (*Hamoraon*), Berketurunan (*Hagabeon*), dan Kehormatan (*Hasangapon*).

Dalam relasi sosial masyarakat Batak Toba dapat dilihat dengan adanya kumpulan-kumpulan arisan satu marga, satu turunan hubungan darah (*satu ompu*), sehingga salah satu dalam kelompok itu ada yang ingin memperebutkan

kekuasaan maka semua kumpulan akan mendukung. Dalam konteks pilkada tungku nan tiga (*dalihan natolu*) sering dimanfaatkan untuk menarik dukungan dengan memakai istilah “*dang tumagon tu halak adong do di hita*” yang artinya tidak lebih baik kepada orang lain jika masih ada dari kita sendiri (Haloho, 2017).

Namun, yang menarik dalam penelitian ini ialah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 perilaku memilih masyarakat Samosir dinilai tidak sesuai dengan filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*). Dalam beberapa konteks isu permasalahan, ada yang menjadi salah satu faktor lain yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan pilihan bagi masyarakat Samosir. Dilihat dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih cenderung dilakukan secara instan. Hal ini didasari karena pengaruh politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh para kandidat untuk kepentingan penambahan suara peserta pemilu.

Dikutip dari berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berjudul “PHP Bupati Samosir: Saksi pasangan Rap-Berjuang ungkap pembagian *Togu-togu ro*”. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa salah satu calon melakukan politik uang. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan seorang saksi 1 yang menyatakan bahwa terjadi politik uang saat Pilkada Samosir Tahun 2020. Pada Oktober 2020, saksi tersebut mengikuti pertemuan yang dipimpin oleh ayah kandung dari seorang pasangan calon tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas tentang sistem pembagian *Togu-togu ro* (memberi dalam bentuk materi/uang) untuk para pemilih pasangan calon yang bersangkutan. Selanjutnya, saksi 2 menerangkan terjadinya politik uang secara masif yang dilakukan pasangan calon

saat pilkada dengan jumlah uang yang sangat besar. Dalam berita tersebut menjelaskan bahwa pada September 2019, saksi tersebut diminta tim pemenangan pihak terkait untuk mengumpulkan KTP sebanyak-banyaknya dengan imbalan parcel berisi sembako per orang. Selain parcel, ada pembagian beras untuk para pemilih. Kemudian, pada 25 Juli 2020 dia bersama dua temannya diminta mengantar kardus besar ke rumah ayah kandung dari salah satu pasangan calon, dimana di dalam kardus tersebut berisikan uang berjumlah Rp 16 miliar.

Berikutnya, Pemohon menghadirkan saksi 3 sebagai penerjemah bahasa Batak yang menerangkan video kejadian seputar politik uang pada Pilkada Samosir. Dalam video tersebut terlihat seorang tokoh sebagai pendukung salah satu calon menjelaskan kepada para tamu yang hadir terkait adanya parcel sembako yang akan dibagi-bagikan kepada para pemilih. Dalam video tersebut dia menjelaskan bahwa jumlah sembako yang dibagikan itu memiliki nilai yang tidak sedikit, sekitar Rp 3 miliar. Jumlah itu belum ditambah lagi untuk biaya pembagian masker dan beras. Diperkirakan harus mencapai 40 miliar rupiah untuk menjadikan salah satu pihak calon tersebut sebagai bupati dan wakil bupati.

Disisi lain, salah satu saksi pendukung pihak terkait menentang kejadian itu, dan ironisnya disini ialah setelah ditelusuri saksi tersebut ternyata semarga dengan penggugat. Dari kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa filosofi tungku nantiga (*dalihan natolu*) yakni semarga (*dongan tubu*) sudah bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga eksistensi filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) tersebut penting untuk dipertanyakan dan diteliti kebenarannya.

Kecamatan Pangururan merupakan salah satu dari sembilan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir. Kecamatan Pangururan sekaligus juga menjadi ibu kota Kabupaten Samosir yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2022 di Kecamatan Pangururan, ditemukan bahwasannya pada pemilihan bupati Samosir terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk amplop yang berisi sejumlah uang sekitar Rp. 200.000-1000.000. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan seorang putra daerah di tanah kelahirannya sendiri, dimana salah satu dari ketiga pasangan calon kepala daerah Kabupaten Samosir yakni paslon nomor urut 3 merupakan berasal dari Kecamatan Pangururan.

Dari hal tersebut, peneliti menilai perilaku memilih masyarakat sebagian besar didasarkan pada keuntungan ekonomi yang mereka dapat dari para kandidat. Melihat fenomena ini membuktikan perkataan Firmanzah (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa rasionalitas ekonomi menjadi sangat penting dipahami di era kapitalisme saat ini. Maksud kapitalisme dalam konteks politik disini ialah dalam pilkada seorang kandidat harus menyiapkan modal yang besar untuk berkompetisi dalam gelanggang politik dengan tujuan untuk menduduki jabatan politik tertentu.

Dari permasalahan di atas dapat dijelaskan bahwasannya tungku nan tiga (*dalihan natolu*) terlihat hanya menjadi semacam slogan yang realisasinya kerap memerlukan proses pertimbangan yang sering meragukan. Dalam hal ini juga

ditemukan situasi kontroversional antara nilai budaya dengan pelaksanaannya di dalam sistem sosial yang dimiliki. Nilai budaya yang dihayati hanya sampai pada tingkat formalitas, dalam artian bentuk luarnya saja yang tampak eksis, tetapi isi yang dilaksanakannya berbeda. Sehingga perbedaan tersebut menjadi sumber konflik diantara anggota masyarakat, bahkan berpotensi merusak tatanan sistem politik Indonesia yang bermartabat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan harapan mampu mendapatkan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu peneliti mengangkat judul **“Eksistensi Filosofi *Dalihan Natolu* Dalam Menentukan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 (Studi Di Kecamatan Pangururan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun masalah yang dapat di identifikasikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Ketidaksesuaian perilaku memilih masyarakat Samosir terhadap nilai filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) dalam menentukan pilihannya.
2. Perilaku memilih masyarakat Samosir selain dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan juga dipengaruhi oleh faktor hal lain salah satunya berupa materi.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas, sehingga tidak memungkinkan dari lapangan permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semuanya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah agar fokus masalah terarah dan tidak meluas dari penelitian, maka peneliti membatasi masalah yaitu Eksistensi filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) dalam perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana eksistensi filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) dalam perilaku memilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) dalam perilaku memilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini memiliki manfaat/kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal yang timbul dari penelitian.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah mengenai studi filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) dalam membentuk persepsi tentang perilaku memilih. Serta dapat dijadikan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai eksistensi filosofi tungku nan tiga (*dalihan natolu*) dalam membentuk persepsi tentang perilaku memilih.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk dijadikan bahan masukan bagi partai politik maupun pemerintah dalam rangka memberikan sosialisasi politik dan kualitas pendidikan politik dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
2. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda.